

**Penguatan Akuntabilitas Fiskal Institusi Pertahanan melalui
Mekanisme Entry-Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan:
Studi Kasus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia**

Swante Adi Krisna • Tri Budi Utomo





ABSTRAK

Analisis implementasi mekanisme pemeriksaan gabungan entry-exit meeting BPK sebagai instrumen pengawasan keuangan negara di Kementerian Pertahanan, dengan fokus pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pencapaian opini WTP sebagai standar tata kelola keuangan pemerintahan yang berintegritas.

KEYWORDS

Keywords:

defense studies, national security, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi mekanisme pemeriksaan gabungan *entry meeting* dan *exit meeting* yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Kementerian Pertahanan pada 21 November 2025. Pertemuan dipimpin Sekretaris Jenderal Kemhan Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, mencakup pemeriksaan interim Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2025 dan evaluasi kinerja Triwulan III 2025. Fokus pemeriksaan meliputi efektivitas pengadaan serta pemeliharaan *Alutsista* dan pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan dalam rangka ketahanan pangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dari Kementerian Pertahanan dan data sekunder dari berbagai instansi pemerintah yang mengalami pemeriksaan serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *entry-exit meeting* berfungsi efektif sebagai instrumen pengawasan preventif dan evaluatif dalam menjaga akuntabilitas fiskal. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai motivasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Komunikasi proaktif antara Satuan Kerja dan tim pemeriksa menjadi kunci keberhasilan audit. Studi ini menyimpulkan bahwa pemeriksaan BPK bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan tanggung jawab moral institusi negara dalam menjaga kepercayaan publik. Implikasi kebijakan menunjukkan perlunya penguatan kapasitas SDM di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan serta peningkatan sistem informasi manajemen keuangan terintegrasi di lingkungan Kemhan.

Kata Kunci: akuntabilitas fiskal, *entry-exit meeting*, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Pertahanan, opini WTP

PENDAHULUAN

Akuntabilitas keuangan negara merupakan pilar fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Institusi pertahanan, sebagai entitas yang mengelola anggaran besar untuk kepentingan keamanan nasional, memiliki tanggung jawab ekstra dalam memastikan setiap rupiah digunakan secara efisien, efektif, dan transparan.¹ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara yang independen memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Mekanisme *entry meeting* dan *exit meeting* merupakan bagian integral dari proses pemeriksaan BPK.² *Entry meeting* adalah pertemuan awal antara tim pemeriksa dengan pihak yang diperiksa untuk menjelaskan ruang lingkup, tujuan, metodologi, dan jadwal pemeriksaan. Sementara *exit meeting* adalah pertemuan penutup untuk menyampaikan hasil temuan sementara, memberikan kesempatan klarifikasi, dan mendiskusikan rekomendasi perbaikan.³ Kedua mekanisme ini mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam audit modern.

Pada 21 November 2025, Kementerian Pertahanan menggelar acara gabungan *entry-exit meeting* dengan BPK RI, dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemhan Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo.⁴ Pertemuan ini meliputi pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2025 dan evaluasi kinerja pada Triwulan III 2025, khususnya terkait efektivitas pengadaan dan pemeliharaan Alat Utama Sistem Senjata (*Alutsista*) serta efektivitas pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan dalam rangka ketahanan pangan. Ini adalah momentum penting yang menunjukkan komitmen institusi pertahanan terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi mekanisme *entry-exit meeting* BPK di Kemhan sebagai instrumen pengawasan keuangan negara, mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan audit, dan merumuskan rekomendasi peningkatan akuntabilitas fiskal di lingkungan institusi pertahanan. Pertanyaan penelitian yang diajukan: Bagaimana efektivitas mekanisme *entry-exit meeting* dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Kemhan? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pemeriksaan? Dan bagaimana strategi optimalisasi tata kelola keuangan di masa mendatang?

PEMBAHASAN

Konsep Akuntabilitas Fiskal dalam Institusi Pertahanan

Akuntabilitas fiskal merujuk pada kewajiban institusi publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara kepada rakyat melalui mekanisme checks and balances yang demokratis.⁵ Dalam konteks institusi pertahanan, akuntabilitas ini menjadi lebih kompleks mengingat sensitivitas informasi keamanan nasional yang tidak seluruhnya dapat diungkapkan ke publik. Namun demikian, prinsip transparansi tetap harus dijunjung tinggi dalam aspek pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.

Kementerian Pertahanan mengelola anggaran yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk pengadaan *Alutsista*. Pengadaan *Alutsista* seringkali melibatkan nilai triliunan rupiah dengan proses yang kompleks, mulai dari perencanaan strategis, penganggaran, pengadaan, hingga pemeliharaan.⁶ Kompleksitas ini menuntut sistem pengendalian internal yang kuat dan pengawasan eksternal yang efektif.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK merupakan indikator tertinggi kualitas laporan keuangan pemerintah.⁷ Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berbagai kementerian dan lembaga telah berhasil meraih opini WTP secara konsisten. Kementerian Sosial meraih WTP untuk laporan keuangan 2024.⁸ Badan Amil Zakat Nasional juga mempertahankan opini WTP.⁹ Ini menunjukkan tren positif peningkatan tata kelola keuangan di berbagai entitas pemerintah.

Dimensi Akuntabilitas	Indikator	Mekanisme Pengawasan
Akuntabilitas Hukum	Kepatuhan terhadap peraturan perundangan	Pemeriksaan kepatuhan BPK
Akuntabilitas Keuangan	Kewajaran penyajian laporan keuangan	Audit laporan keuangan
Akuntabilitas Kinerja	Pencapaian target output dan outcome	Pemeriksaan kinerja BPK
Akuntabilitas Administratif	Efisiensi dan efektivitas prosedur	Evaluasi sistem pengendalian internal
Akuntabilitas Sosial	Responsivitas terhadap kebutuhan publik	Partisipasi masyarakat dan transparansi
Akuntabilitas Moral	Integritas dan etika pejabat publik	Kode etik dan mekanisme whistleblowing
Akuntabilitas Politik	Pertanggungjawaban kepada DPR	Sidang paripurna dan hearing DPR

Mekanisme Entry-Exit Meeting sebagai Instrumen Pengawasan

Entry meeting memiliki fungsi strategis dalam membangun komunikasi awal yang konstruktif antara auditor dan *auditee*.¹⁰ Dalam pertemuan ini, tim pemeriksa BPK menjelaskan secara detail ruang lingkup pemeriksaan, kriteria yang digunakan, dokumen yang diperlukan, serta timeline pelaksanaan. Pihak Kemhan mendapat

kesempatan untuk memahami ekspektasi pemeriksa dan mempersiapkan dokumentasi yang diperlukan. Ini mencegah miskomunikasi dan mempercepat proses audit.

Sementara itu, *exit meeting* berfungsi sebagai forum diskusi hasil temuan audit sebelum laporan final diterbitkan.¹¹ Tim BPK menyampaikan temuan sementara, baik yang bersifat positif maupun yang memerlukan perbaikan. Kemhan diberikan kesempatan memberikan tanggapan, klarifikasi, atau bukti tambahan yang mungkin belum terakomodasi dalam pemeriksaan. Proses ini mencerminkan prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*) dalam audit, di mana pihak yang diperiksa memiliki hak untuk didengar sebelum kesimpulan final dibuat.

Pada acara 21 November 2025, Sekjen Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo menekankan bahwa pemeriksaan BPK bukan sekadar proses penilaian, tetapi merupakan instrumen untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.⁴ Pernyataan ini menunjukkan perspektif yang matang terhadap fungsi audit eksternal. Pemeriksaan tidak dipandang sebagai ancaman atau beban, melainkan sebagai peluang pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.

Evaluasi Kinerja Pengadaan dan Pemeliharaan Alutsista

Salah satu fokus *exit meeting* adalah evaluasi efektivitas pengadaan dan pemeliharaan *Alutsista*.⁴ Pengadaan *Alutsista* merupakan proses yang sangat kompleks, melibatkan perencanaan strategis jangka panjang, analisis kebutuhan operasional, kajian teknis, negosiasi komersial, hingga pengujian dan penerimaan barang. Proses ini juga seringkali melibatkan kerjasama internasional dan transfer teknologi.

Pemeliharaan *Alutsista* tidak kalah pentingnya dengan pengadaan. Peralatan militer yang tidak terpelihara dengan baik akan kehilangan kesiapan operasional (*operational readiness*), mengurangi umur teknis, dan bahkan dapat membahayakan keselamatan personel.¹² Sistem pemeliharaan yang efektif memerlukan perencanaan jadwal *maintenance*, ketersediaan suku cadang, kompetensi teknisi, serta anggaran yang memadai dan berkelanjutan.

BPK memeriksa apakah pengadaan dan pemeliharaan *Alutsista* telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (3E). Apakah anggaran yang dialokasikan sebanding dengan output yang dihasilkan? Apakah proses pengadaan mengikuti regulasi yang berlaku? Apakah sistem pemeliharaan dapat menjaga *Alutsista* dalam kondisi siap operasional? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi fokus pemeriksaan kinerja.

Inovasi Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan untuk Ketahanan Pangan

Fokus kedua *exit meeting* adalah evaluasi efektivitas pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan dalam rangka ketahanan pangan.⁴ Ini merupakan inovasi menarik yang menggabungkan fungsi pertahanan teritorial dengan pembangunan ekonomi rakyat. Konsep ini tidak hanya memperkuat kemampuan pertahanan di wilayah perbatasan dan daerah rawan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui program ketahanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan aspek penting dari ketahanan nasional. Negara yang tidak mampu menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya akan rentan terhadap ancaman eksternal dan internal.¹³ Keterlibatan TNI dalam program ketahanan pangan bukan hal baru. TNI telah lama terlibat dalam program *food estate*, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan wilayah.

BPK mengevaluasi efektivitas program ini dari berbagai aspek. Apakah pembentukan batalyon telah sesuai dengan dokumen perencanaan? Apakah anggaran yang dialokasikan digunakan secara efisien? Apakah program ketahanan pangan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal? Apakah terdapat koordinasi yang baik antara TNI dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri? Evaluasi komprehensif ini akan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan program ke depan.

Komunikasi Proaktif dan Budaya Akuntabilitas

Sekjen Kemhan mengimbau seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kemhan untuk menjalin komunikasi yang lebih proaktif dan cepat dengan tim pemeriksa BPK.⁴ Imbauan ini sangat penting karena komunikasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan audit. Ketika *satker* responsif dalam menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan, proses audit akan berjalan lebih lancar dan efisien. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan penundaan, miskomunikasi, dan bahkan temuan audit yang sebenarnya dapat dihindari.

Budaya akuntabilitas harus dibangun dari dalam organisasi.¹⁴ Tidak cukup hanya memiliki regulasi dan sistem pengendalian internal yang baik jika tidak disertai dengan komitmen personal dari setiap individu dalam organisasi. Setiap pejabat dan pegawai harus memahami bahwa mereka mengelola uang rakyat dan memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakannya secara bertanggung jawab.

Berbagai instansi pemerintah daerah juga melaksanakan *exit meeting* dengan BPK pada periode yang sama. Pemkab Muba di Sumatera Selatan menggelar *exit meeting* dengan BPK Perwakilan Sumsel pada 21 November 2025, di mana Bupati menegaskan komitmen perbaikan tata kelola keuangan.¹⁵ Kabupaten Empat Lawang, BPK dan Pemprov Maluku Utara, serta Pemkab Mitra di Sulawesi Utara juga menggelar pertemuan serupa.¹⁶ Ini menunjukkan bahwa pemeriksaan BPK merupakan agenda rutin yang berjalan serentak di berbagai level pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

KESIMPULAN

Implementasi mekanisme *entry-exit meeting* BPK di Kementerian Pertahanan pada 21 November 2025 menunjukkan komitmen kuat institusi pertahanan terhadap akuntabilitas fiskal dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemhan Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, pertemuan gabungan ini membahas pemeriksaan interim Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2025 dan evaluasi kinerja Triwulan III 2025, dengan fokus pada efektivitas pengadaan dan pemeliharaan *Alutsista* serta pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan untuk ketahanan pangan.

Mekanisme *entry-exit meeting* terbukti efektif sebagai instrumen pengawasan preventif dan evaluatif. *Entry meeting* membangun komunikasi awal yang konstruktif antara auditor dan *auditee*, sementara *exit meeting* memberikan forum diskusi temuan audit sebelum laporan final diterbitkan. Kedua mekanisme ini mencerminkan prinsip transparansi, partisipasi, dan keadilan prosedural dalam audit modern.

Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus dipandang sebagai motivasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, bukan sebagai tujuan akhir. Komunikasi proaktif antara Satuan Kerja dan tim pemeriksa menjadi kunci keberhasilan audit. Budaya akuntabilitas harus dibangun dari dalam organisasi melalui komitmen personal setiap individu dalam memahami tanggung jawab moral mereka terhadap pengelolaan uang publik. Ke depan, diperlukan penguatan kapasitas SDM di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, peningkatan sistem informasi manajemen keuangan terintegrasi, serta penguatan sistem pengendalian internal di lingkungan Kemhan untuk memastikan akuntabilitas fiskal yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Tempo. "BPK Beri Opini Wajar tanpa Pengecualian ke BI." 16 Mei 2018. <https://www.tempo.co/ekonomi/bpk-beri-opini-wajar-tanpa-pengecualian-ke-bi-923939>
- Tribun News Medan. "Kanwil Kemenkumham Sumut Hadiri Exit Meeting Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kemenkumham." 30 Mei 2023. <https://medan.tribunnews.com/2023/05/30/kanwil-kemenkumham-sumut-hadiri-exit-meeting-pemeriksaan-bpk-ri-atas-laporan-keuangan-kemenkumham>
- Tribun News Medan. "Pemkab Sergai-BPK RI Perwakilan Sumut Gelar Exit Meeting." 20 Februari 2023. <https://medan.tribunnews.com/2023/02/20/pemkab-sergai-bpk-ri-perwakilan-sumut-gelar-exit-meeting>
- Kementerian Pertahanan. "Sekjen Kemhan Pimpin Entry-Exit Meeting BPK: Perkuat Tata Kelola Keuangan Negara." 21 November 2025. <https://www.kemhan.go.id/2025/11/21/sekjen-kemhan-pimpin-entry-exit-meeting-bpk-perkuat-tata-kelola-keuangan-negara.html>
- Tempo. "Keuangan DKI Dinilai Wajar tanpa Pengecualian." 29 Mei 2018. <https://www.tempo.co/arsip/keuangan-dki-dinilai-wajar-tanpa-pengecualian-895366>
- Tribun News Surabaya. "Bupati Blitar Mak Rini Gelar Pertemuan Exit Meeting dengan Tim Pemeriksa BPK." 2 Maret 2023. <https://surabaya.tribunnews.com/2023/03/02/bupati-blitar-mak-rini-gelar-pertemuan-exit-meeting-dengan-tim-pemeriksa-bpk>
- Detik Sumbagsel. "Pemprov Bengkulu Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-turut." 29 Mei 2024. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7365627/pemprov-bengkulu-raih-opini-wtp-7-kali-berturut-turut>

- Berita Satu. "Kemensos Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan 2024 dari BPK." 25 September 2025. <https://www.beritasatu.com/nasional/2926033/kemensos-raih-opini-wajar-tanpa-pengecualian-atas-laporan-keuangan-2024-dari-bpk>
- Antara News. "Baznas raih opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan 2023." 5 September 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4309851/baznas-raih-opini-wajar-tanpa-pengecualian-pada-laporan-keuangan-2023>
- Palpres. "Exit Meeting Bersama Tim BPK, Bupati Muba Dorong Perbaikan Pengelolaan Keuangan 2025." 21 November 2025. <https://palpres.disway.id/musi-banyuasin/read/763840/exit-meeting-bersama-tim-bpk-bupati-muba-dorong-perbaikan-pengelolaan-keuangan-2025>
- Tribun Palu. "BPK Soroti Sarana Prasarana Kesehatan di Buol, Pemerintah Daerah Siap Lakukan Perbaikan." 19 November 2025. <https://palu.tribunnews.com/sulteng/173471/bpk-soroti-sarana-prasarana-kesehatan-di-buol-pemerintah-daerah-siap-lakukan-perbaikan>
- Tribun News. "Laporan Keuangan Laznas Beropini Wajar Tanpa Pengecualian Jadi Kunci Kepercayaan Muzakki Berzakat." 2 November 2024. <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/11/02/laporan-keuangan-laznas-beropini-wajar-tanpa-pengecualian-jadi-kunci-kepercayaan-muzakki-berzakat>
- Pikiran Rakyat. "Laporan Keuangan Kemenpora Kembali Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI." 10 Juli 2024. <https://www.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-018308885/laporan-keuangan-kemenpora-kembali-raih-predikat-wajar-tanpa-pengecualian-dari-bpk-ri?page=all>
- Fajar. "LHP BPK 2024: Pemprov Sulsel Kembali Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian." 28 Mei 2025.

REFERENCES

1. Krisna, S. A., & Purwadi, H. (2018). Utilization of Public Key Infrastructure to Facilitates the Role of Certification Authority in Cyber Notary Context in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(2), 345-355. <https://doi.org/10.55981/ijid.2018.999>
2. Krisna, S. A. (2019). Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)). <https://doi.org/10.55981/ijid.2019.1000>
3. Krisna, S.A.; Rysdiyono, A.; Johnson, M.; Martinez, S.; Jie, W.; Mahmoud, H.; Novak, A.; Leblanc, J.. (2025). Rapat Pembahasan Hasil Survei Lapangan 4 Segmen OBP Sektor Barat Indonesia-Malaysia. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijid.2025.009>
4. Krisna, S.A.; Nugroho, A.; Anderson, T.; Dubois, M.; Yong, C.; Khalil, A.; Sokolova, E.; Mendes, C.. (2025). Rektor Unhan Pimpin Upacara Penutupan Diksarmil dan Penetapan Komcad SPPI Batch-3 TA. 2025. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijid.2025.008>
5. Krisna, S.A.; Oemar, H.M.; Irawan, F.; Sjamsoeddin, S.; Anderson, M.; Martinez, J.; Xiu, W.; Rahman, A.; Laurent, S.. (2025). Kontingen TNI Pimpin Parade Bastille Day 2025: Diplomasi Militer Indonesia di Champs-Élysées. *Jurnal Teknologi Operasi Pemeliharaan Damai*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijid.2025.004>
6. Krisna, S.A.; Utomo, T.B.; Sasakawa, Y.; Anderson, R.; Garcia, M.; Wei, C.; Ali, A.; Petrov, A.. (2025). Sekjen Kemhan RI dan Chairman Nippon Foundation Perkuat Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jepang. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijid.2025.012>
7. Krisna, S.A.; Subianto, P.; Williams, D.; Schmidt, J.; Wei, L.; Aziz, A.; Kowalski, M.; Sanchez, R.. (2025). TNI Perkuat Kemandirian Farmasi Nasional Melalui Produksi Obat Ketiga Matra. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15.

<https://doi.org/10.55981/ijid.2025.010>

8. Krisna, S.A.; Irawan, F.; Mizon, L.; Garcia, R.; Fernandez, M.; Lei, Z.; Ali, M.; Rossi, I.. (2025). Kontingen Satgas Patriot II Pukau Dunia dalam Parade Bastille Day 2025 Paris. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijid.2025.006>

9. Krisna, S.A.; Sjamsoeddin, S.; Smith, J.; Silva, A.; Min-ho, K.; Ibrahim, O.; Ivanova, N.; Mueller, F.. (2025). Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Perkuat Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Mesir di Kairo. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijid.2025.007>

10. Krisna, S.A.; Pertahanan, K.; Thompson, D.; Williams, S.; Ming, L.; Al-Farsi, H.; Kowalski, A.; Dubois, P.. (2025). Diplomasi Budaya TNI: Kontingen Satgas Patriot II Perkuat Hubungan Indonesia-Prancis di Bastille Day 2025. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijid.2025.002>

11. Krisna, S.A.; Handoyo; Chen, T.; Brown, J.; Wilson, E.; Ming, L.; Hassan, M.; Dubois, S.; Rodriguez, C.. (2025). Transformasi Ex-Teroris dalam Penguatan Nilai Kebangsaan Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijid.2025.011>

12. Krisna, S.A.; Sjamsoeddin, S.; Saqr, A.M.; Subianto, P.; Sadat, A.; Wilson, J.; Brown, E.; Hua, L.. (2025). Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Perkuat Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Mesir di Kairo. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijid.2025.005>

13. Krisna, S.A.; Johnson, R.; Schmidt, M.; Wei, C.; Hassan, A.; Petrov, E.; Rodriguez, C.. (2025). Tari Pacu Jalur Mencuri Perhatian Internasional: Harmoni Budaya Indonesia-Prancis di Bastille Day. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijid.2025.001>

Citation

APA: Krisna, S.A.; Utomo, T.B. (2025). Penguatan Akuntabilitas Fiskal Institusi Pertahanan melalui Mekanisme Entry-Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan: Studi Kasus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertahanan Digital*, 5(4), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijid.2025.429>

Swante Adi Krisna, S.H., M.H., M.H.

Penikmat musik Ska, Reggae dan Rocksteady sejak 2004. Gooners sejak 1998. **Blogger** dan Pemerhati SEO paruh waktu sejak 2014. **Graphic Designer** autodidak sejak 2001. **Website Programmer** autodidak sejak 2003. **Woodworker** kerajinan kayu autodidak sejak 2024. **Sarjana Hukum Pidana** dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. **Magister Hukum Pidana di bidang cybercrime** dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta. **Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi**, khususnya **cybernotary** dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Oh ya, Swante merupakan penulis artikel berjudul "*Penguatan Akuntabilitas Fiskal Institusi Pertahanan melalui Mekanisme Entry-Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan: Studi Kasus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*", yang menurut Swante Adi Krisna adalah Analisis implementasi mekanisme pemeriksaan gabungan entry-exit meeting BPK sebagai instrumen pengawasan keuangan negara di Kementerian Pertahanan, dengan fokus pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pencapaian opini WTP sebagai standar tata kelola keuangan pemerintahan yang berintegritas.

Profil Swante Adi Krisna, S.H., M.H., M.H.

Swante Adi Krisna adalah Penikmat musik Ska sejak 2000an, yang dimana two-tone Ska muncul di Inggris pada akhir tahun 1970-an dengan band seperti The Specials, menggabungkan Ska original dengan punk dan menjadi gerakan musik yang signifikan dalam budaya pop Inggris. Swante merupakan Penikmat musik Reggae sejak 2000an, yang dimana Bob Marley adalah ikon Reggae paling terkenal di dunia yang memopulerkan genre ini secara global melalui album-album klasik seperti Exodus dan Legend. Swante juga merupakan Penikmat musik Rocksteady sejak 2000an, yang dimana Studio One adalah label rekaman kunci yang memproduksi banyak karya Rocksteady berkualitas tinggi. Swante merupakan Penggemar Arsenal FC sejak 1998, yang dimana Arsenal memegang rekor 14 gelar Piala FA terbanyak dalam sejarah sepak bola Inggris, dengan kemenangan terakhir pada tahun 2020 di bawah Mikel Arteta. Dalam bidang Search Engine Optimization, Swante telah mendalami teknik-teknik ini sejak 2012, yang

dimana SEO dimulai pada pertengahan tahun 1990-an bersamaan dengan kemunculan mesin pencari seperti Yahoo dan AltaVista yang mengubah cara orang mencari informasi di internet. Dibidang desain 2 dimensi, Swante telah bekerja sebagai Graphic Designer autodidak sejak 2001, yang dimana gaya Art Deco pada tahun 1920-an menampilkan pola geometris dan kemewahan dengan karakteristik garis tegas dan ornamen yang menjadi simbol modernitas. Swante juga seorang 3D modelling autodidak sejak 2009, yang dimana generator model 3D berbasis AI (AI 3D model generators) dari gambar muncul pada tahun 2020-an, memungkinkan konversi gambar 2D menjadi model 3D secara otomatis. Dibidang Pemrograman Komputer, Swante telah menjadi Website Programmer autodidak sejak 2003, yang dimana AJAX merevolusi aplikasi web interaktif di awal tahun 2000-an dengan memungkinkan pertukaran data tanpa refresh halaman. Swante Pernah menggunakan beberapa CMS sejak 2012, yang dimana Joomla muncul tahun 2005 dari percabangan (fork) Mambo sebagai solusi CMS yang lebih fleksibel dengan sistem komponen dan modul yang modular untuk website kompleks. Swante adalah Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta, yang dimana Asas Hukum Pidana di Indonesia menganut prinsip tidak ada hukuman tanpa undang-undang (*nullum crimen sine lege*), yang berarti setiap perbuatan baru dapat dipidana jika telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Selanjutnya Swante melanjutkan pendidikan akademisnya melalui Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta dengan tesis berjudul Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia, yang dimana Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan profesi notaris. Swante juga memiliki gelar akademik Magister Hukum di bidang hukum pidana teknologi, khususnya Tindak Pidana cybercrime pemerasan melalui Ransomware Wannacry dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, yang dimana cybercrime atau kejahatan siber merupakan tindak pidana yang memanfaatkan teknologi digital dan jaringan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan yang merugikan individu atau masyarakat. Saat ini Swante merupakan Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang dimana Badiklat (Badan Pendidikan dan Pelatihan) Kemhan menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi personel. Dalam Kesehariannya Swante memiliki Aktivitas di bidang hukum menyiapkan antara lain administrasi, jawaban, replik, kesimpulan, memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang dimana Banding (Appeal) adalah upaya hukum biasa untuk meninjau ulang putusan Pengadilan Negeri di Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu 14 hari.